



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Renja Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Magelang, Juli 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG



NANANG KRISTİYONO, S.STP, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19750119 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.....	39
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	43
2.3.1 Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	43
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	45
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional	45
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan ...	46
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024	47
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	68
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	70
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	70
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.....	70
3.3 Program dan Kegiatan	74
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	90
BAB V PENUTUP	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022.....	8
Tabel 2.2.1 Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	12
Tabel 2.2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.....	14
Tabel 2. 3 Sasaran Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	39
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.....	41
Tabel 2. 4. 1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Magelang	49
Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Magelang.....	69
Tabel 3. 1 Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang.....	71
Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	72
Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Magelang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	76
Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	91

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sesuai

dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Magelang.

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok sasaran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun lalu dan evaluasi hasil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang; pembahasan Rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang; perumusan Rancangan Akhir Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk tahun keempat periode Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2025, Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, Renja K/L, dan Renja Tahun 2025 BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dengan periode 5 (lima) tahun yang memiliki maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- 3.3 Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut dan disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusun suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni tahun 2025.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta subag/subid pelaksana.

Adapun capaian indikator kinerja pada Renja tahun 2023 sebagai bahan evaluasi bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1
Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023

No .	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
1.	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	109,43 %	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Anggaran	100%
		Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	109,37 %		2.Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Perbendaharaan	100%
		Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	109,46 %		2.Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Akuntansi	100%
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penganggaran sesuai ketentuan	100%
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	100%
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase LK OPD yang sesuai dengan ketentuan	100%

				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	100%
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	100%
2.	Tujuan : Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	124,72 %	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	137,72%
	Sasaran : Tercapainya peningkatan pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	132,72 %	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	105,27%

Sumber : LKjIP 2023 BPKAD Kota Magelang

Dari hasil evaluasi kinerja pada Tahun 2023, dapat dilihat bahwa perencanaan program maupun kegiatan BPKAD Kota Magelang pada tahun 2023 telah tersusun dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator dengan capaian rata-rata sebesar 100%. Dapat dikatakan pula bahwa realisasi program dan kegiatan yang dialokasikan pada tahun 2023 telah berhasil menunjang pencapaian indikator yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan hasil evaluasi di atas serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Dalam artian bahwa seluruh Program dan Kegiatan telah berhasil mencapai target yang ditentukan. Bahkan terdapat 1 Program dan 1 Kegiatan yang capaian indikator kerjanya melebihi dari target yaitu Program Pengelolaan Pendapatan

daerah dan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Berikut adalah capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2023 :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian indikator kerjanya masing-masing sebagai berikut :
 - Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Anggaran sebesar 100%
 - Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Perbendaharaan sebesar 100%
 - Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Akuntansi sebesar 100%
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 137,72%
4. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
5. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
6. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
7. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 105,27%

Hal tersebut tentunya tidak lepas dari beberapa faktor yang mendukung, di antaranya adalah :

1. Tersedianya sistem penganggaran yang terpadu dari Kementerian yang mempermudah dalam teknis penyusunan dokumen penganggaran.
2. Media yang selalu update dalam memberikan akses informasi, sosialisasi, bimtek atas ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah
3. Pemanfaatan teknologi sistem informasi yang terintegrasi serta yang memberikan informasi secara transparan, terupdate dan akuntabel, yang mempermudah dalam pengumpulan, penarikan data, serta pelaksanaan transaksi keuangan yang diperlukan guna penyusunan laporan-laporan yang dibutuhkan.

4. Koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait.
5. Timeline perencanaan yang lebih efektif dan efisien.
6. Adanya pengembangan-pengembangan pada Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah yang memudahkan Wajib Pajak/Wajib Retribusi untuk menyetorkan pajak/retribusi daerah yang menjadi kewajibannya.
7. Kebijakan penerapan transaksi non tunai.
8. Stimulan kepada masyarakat untuk pro aktif membayar pajak daerah melalui penyelenggaraan atau even Gebyar Pajak Daerah.

Namun terdapat pula beberapa program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang diatas yang capaiannya sesuai target, yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola keuangan daerah dan pengelola Barang Milik Daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan dan laporan Barang Milik Daerah.
2. Semua perangkat daerah telah paham dan patuh terhadap ketentuan yang ada dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
3. Sosialisasi atau pembinaan pengelola keuangan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara intensif.

Tabel 2. 2.1
Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi
Target Kinerja Program/Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Magelang

No.	Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Melebihi Target	Solusi yang dilakukan
1.		Dukungan OPD yang memiliki keterkaitan fungsi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta tanggung jawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu	Komitmen para Pejabat Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada SKPD	Lebih mengintensifkan lagi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara transparan dan akuntabel
2.		1. Proyeksi pendapatan asli daerah yang telah mendekati potensi 2. Semakin meningkatnya pemahaman pengelola keuangan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI)		1. Mendorong untuk lebih ditingkatkan lagi kajian potensi untuk setiap jenis pendapatan baik pajak daerah maupun retribusi daerah 2. Meningkatkan intensifikasi pembinaan kepada pengelola keuangan OPD
3.		Semakin meningkatnya kompetensi SDM Pengurus Barang	Komitmen para Pengurus Barang OPD untuk mewujudkan Laporan Barang	Melakukan pembinaan rutin terhadap pejabat penatausahaan barang, pengurus barang

			OPD yang baik	dan pengurus barang pembantu
4.		Belum tersedianya kajian potensi pada setiap jenis pendapatan pajak dan retribusi daerah, sehingga dalam menentukan target atau proyeksi pendapatan belum sesuai dengan potensi yang ada		Untuk dilakukan kajian potensi untuk setiap jenis pendapatan 2.Meningkatkan PAD melalui peningkatan kontribusi BUMD yang berupa pengelolaan BUMD secara lebih profesional lagi.
		Belum optimalnya digitalisasi pendapatan asli daerah sehingga menyebabkan kualitas dan kuantitas data (seperti objek pajak, retribusi) belum terbangun dengan baik	Sosialisasi secara masif kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	Meningkatkan konektivitas antara sistem di BPKAD dengan sistem lain di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang belum terbangun dengan baik

Sumber: LKjIP Tahun 2023 BPKAD Kota Magelang

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi	100(%)	100(%)	100(%)	100(%)	100(%)	100(%)	100(%)	100(%)

				umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.								
01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100(%)	100(%)	100(%)	100(%)	100(%)	100(%)	100%	100%
01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 dokumen	100.00%	6 Dokumen	6 dokumen	100%
01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	1 dokumen	100%

				RKA-SKPD								
01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	0 dokumen	0%
01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	1 dokumen	100%
01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	0 dokumen	0%

01	201	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	3 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100.00%	30 Laporan	15 laporan	50%
01	202			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	100 (%)	100(%)	100 (%)	100(%)	100(%)	100 (%)	100%	100%
01	202	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/Bulan	48 orang	41 orang	41 orang	100.00%	38 Orang/Bulan	38 orang	100%
01	202	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	24 Dokumen	24 Laporan	24 Dokumen	24 Dokumen	100.00%	24 Dokumen	12 dokumen	50%

				asi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
01	202	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 laporan	100.00%	18 Laporan	10 laporan	55.56%
01	205			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan	100 (%)	100(%)	100 (%)	100(%)	100(%)	100 (%)	100%	100%
01	205	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan pameran hasil pengelolaan keuangan daerah	2 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
				Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang	75 Orang	75 Orang	-	-	-	-	-	-

				Peraturan Perundang-Undangan	Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	12 dokumen	6 dokumen	50%
01	2016			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	100 (%)	100(%)	100 (%)	100(%)	100(%)	100 (%)	100%	100%
01	2016	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Ruang	35 Paket	35 Paket	100.00%	20 Paket	11 paket	31.43%
01	2016	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	4 Paket		-	-	-	-	-	-

				Kantor	Disediakan								
01	2016	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	80 orang	80 Paket	80 Paket	100.00%	80 Paket	40 Paket	50%
01	2016	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	15 jenis	15 Paket	15 Paket	100.00%	13 Paket	7 paket	50%
01	2016	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 jenis	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	3 Dokumen	2 dokumen	66.67%
01	2016	07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket	22 jenis	25 Paket	25 Paket	100.00%	30 Paket	15 paket	60%
01	2016	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	13 Laporan	61 Kunjungan	14 Laporan	14 Laporan	100.00%	14 Laporan	7 laporan	53.85%
0	20	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan	40	42	31 Laporan	31 Laporan	100.00%	42	21 laporan	52.5%

1	6			dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	kegiatan				Laporan		
01	2018			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	100 (%)	100(%)	100 (%)	100(%)	100(%)	100 (%)	100%	100%
01	2018	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3500 Laporan	2000 Surat	3500 Laporan	3500 Laporan	100.00%	3600 Laporan	1800 laporan	51.43%
01	2018	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5 Jenis	5 Laporan	5 Laporan	100.00%	12 Laporan	6 laporan	120%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	8 Orang	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12 Laporan	6 laporan	50%

					yang disediakan								
01	207			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100 (%)	100(%)	100 (%)	100(%)	100(%)	100 (%)	100%	100%
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-
01	207	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0 unit	-	-	-	-	-	-
01	207	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	00 unit	0 unit	-	-	-	-	-	-
01	207	06		Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	36 unit	5 unit	2 unit	2 unit	100.00%	5 unit	5 unit	100%

				Mesin Lainnya	yang Disediakan								
01	2017	08		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%
01	2019			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100 (%)	100(%)	100 (%)	100(%)	100(%)	100 (%)	100%	100%
01	2019	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	100.00%	24 Unit	12 unit	48%
01	2019	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64 Unit	63 Unit	46 Unit	46 Unit	100.00%	50 Unit	25 unit	39.06%

				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
01	2019	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 unit	16 Unit	16 Unit	100.00%	16 Unit	16 unit	100%
01	2019	08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100.00%	3 Unit	2 unit	66.67%
01	2019	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	12 Unit	12 unit	9 unit	9 unit	100.00%	9 Unit	5 unit	41.67%
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah		100%		99.44%			99.56%		
					1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	100%		98.33%			98.67%	50%	50%

				2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	100%		100%			100%	90.76%	90.76%
				2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	100%		100%			100%	100%	100%
02	201		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase Penganggaran sesuai ketentuan	98.67%		98.33%			98.67%	50%	50.67%
02	201	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	2 dokumen	0	0%
02	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	2 dokumen	0	0%
0	20	03	Koordinasi, Penyusunan dan	Jumlah RKA-SKPD yang	28	28	28	28	100.00%	28	0	0%

2	1			Verifikasi RKA-SKPD	Diverifikasi	dokumen	Dokumen	dokumen	Dokumen		dokumen		
0 2	20 1	04		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 dokumen	28 Dokumen	28 dokumen	28 Dokumen	100.00%	28 dokumen	0	0%
0 2	20 1	07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	2 dokumen	0	0%
0 2	20 1	08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100.00%	3 dokumen	1	33.33%
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	1 dokumen	1 dokumen	100%

				Anggaran	Anggaran								
0 2	20 2			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.76%	90.76%
0 2	20 1	05		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	100.00%	28 dokumen	28 dokumen	100%
0 2	20 1	06		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	100%
0 2	20 2	03		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	112 dokumen	112 dokumen	112 dokumen	112 dokumen	100.00%	112 dokumen	56 dokumen	50%
0 2	20 2	04		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 dokumen	12 laporan	12 dokumen	12 Dokumen	100.00%	12 dokumen	6 dokumen	50%

0 2	20 2	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	102 dokumen	16 laporan	16 dokumen	16 Dokumen	100.00%	102 dokumen	44 dokumen	43.14%
0 2	20 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi	22 laporan	2 laporan	20 Laporan	20 Laporan	100.00%	22 laporan	11 laporan	50%

				dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
0 2	20 2	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 dokumen	12 laporan	12 dokumen	12 Dokumen	100.00%	12 dokumen	6 dokumen	50%

0 2	20 2	10		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	1 dokumen	0 dokumen	0%
0 2	20 3			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase LK OPD yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0 2	20 3	02		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	102 dokumen	103 dokumen	102 dokumen	102 dokumen	100.00%	102 dokumen	56 dokumen	54.90%

					Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban								
0 2	20 3	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100.00%	12 laporan	12 laporan	100%	
0 2	20 3	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/K ota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/K	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	2 dokumen	2 dokumen	100%	

					ota								
0 2	20 3	08		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	0 dokumen	0 Dokumen	-
0 2	20 3	09		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	1 dokumen	1 dokumen	100%
0 2	20 3	10		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
0 2	20 3	11		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungj	204 orang	4 laporan	103 Orang	103 Orang	100.00%	204 orang	102 orang	50%

					waban Pemerintah Kabupaten/K ota								
0 2	20 4			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100 %	100%	100%	100%	100	50	50%
0 2	20 4	09		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 laporan	100 %	12 laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
0 3				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	85.71%	85.71%	85.71%	85.71%	100%	85.71%	100%	116.67%
0 3	20 1			Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	69.31%	100%	74.68%	100%	133.90%	80.71%	100%	100%
0 3	20 1	01		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	2 dokumen	1 dokumen	50%
				Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan	Jumlah Standar Barang Milik	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	0 dokumen	0 dokumen	-

				Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah								
0 3	20 1	03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100.00%	7 dokumen	5 dokumen	71.43%
0 3	20 1	05		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00%	1 laporan	1 laporan	100%
0 3	20 1	06		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	1 laporan	0 laporan	0%
0 3	20 1	07		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	12 laporan	100.00%	12 laporan	6 laporan	50%
0 3	20 1	08		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	4 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100.00%	4 laporan	2 laporan	50%

					Penilaian Barang Milik Daerah								
0 3	20 1	10		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100.00%	4 dokumen	2 dokumen	28.57%
0 3	20 1	12		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	100.00%	14 laporan	14 laporan	100%
0 3	20 1	13		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 orang	14 laporan	200 orang	200 orang	100.00%	200 orang	200 orang	100%

04				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	165.48%	176.72%	115.47%	110.06%	151.57	121.15	79.20%	53.93%
04	201			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	53.93%	53.93%
04	201	01		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	1 laporan	1 dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 dokumen	1 dokumen	100%
04	201	03		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100.00%	4 laporan	2 laporan	50%
04	201	06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	17 laporan	17 Peta	17 laporan	17 Laporan	100.00%	17 laporan	10 laporan	58.83%
0	20	07		Penilaian Pajak Bumi dan	Jumlah Objek Pajak yang	1200 Objek	800	1200 Objek	1207 Objek	100.58%	1200 Objek	428 objek	35.67%

4	1			Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Disesuaikan NJOP nya	Pajak	Dokumen	Pajak	Pajak		Pajak	pajak	
04	201	08		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	36000 dokumen	39321 SPPT	36000 Dokumen	39053 Dokumen	108.48%	36000 dokumen	36000 dokumen	100%
04	201	10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 dokumen	12 Laporan	12 dokumen	12 Dokumen	100.00%	12 dokumen	6 dokumen	50%
04	201	11		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 dokumen	8 jenis	10 dokumen	10 Dokumen	100.00%	10 dokumen	6 dokumen	60%
04	201	13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan	12 dokumen	12 Laporan	12 dokumen	12 Dokumen	100.00%	12 dokumen	8 dokumen	66.66%

					Pajak Daerah								
0 4	20 1	14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 laporan	3 dokumen	4 laporan	4 laporan	100.00%	4 laporan	2 laporan	50%
0 4	20 1	15		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	100.00%	1 laporan	1 laporan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kota Magelang adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 3
Sasaran Strategi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024 (TW II)	%
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	92,03%	89,84%	97,62%
Meningkatnya Kemandirian Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	35,64%	46,54%	130,58%
Meningkatnya pelayanan Perangkat Daerah yang	Persentase Pelayanan Internal Perangkat	100%	100%	100,00%

berkualitas	Daerah yang Berkualitas			
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	91,43%	80,25%	87,77%
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	92,64%	99,43%	107,33%
Meningkatnya Pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	25,81%	30,12%	116,70%

Apabila dilihat dari tingkat kemajuan yang dicapai dari masing-masing indikator sampai dengan triwulan II tahun 2024 untuk indikator pencapaian sasaran strategis diperoleh 1 (satu) indikator dengan prosentase atau tingkat capaian sama dengan 100%, dan 3 (tiga) indikator yang tingkat kemajuannya lebih dari 100%. Maka bisa disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran BPKAD Kota Magelang telah baik.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan Keuangan, disajikan dalam tabel berikut ini .

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Magelang

No	Indikator	SPM/ stan dar nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1) TWII	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Renstra 2021-2026												
	Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	-	-	91.09	92.03	93.69	93.87	99.68	89.84	93.69	93.87	
	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	91.43	91.43	93.10	93.10	100	80.25	93.10	93.10	
	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	-	-	100.00	98.33	98.67	99.33	100	50.00	98.67	99.33	
	Persentase capaian pengelolaan keuangan	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100	90.76	100.00	100.00	

	daerah bidang perbendaharaan											
	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	
	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	90.76	92.64	94.29	94.64	99.35	99.43	94.29	94.64	
	Cakupan Pengelolaan BMD	-	-	85.71	85.71	89.29	89.29	100	100.00	89.29	89.29	
	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	-	-	34.61	35.64	36.69	36.69	45.10	46.54	36.69	36.69	
	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	-	-	25.25	25.81	26.37	26.37	33.51	30.12	26.37	26.37	
	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah			110.06	115.47	121.15	124.37	151.57	79.20	121.15	124.37	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Masih kurang tergalinya potensi pajak daerah;
2. Belum optimalnya pemanfaatan aset sebagai potensi PAD;
3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditingkatkan.

2.3.1 Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Bedasarkan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

Tugas :

1. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di bawahnya;
4. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
5. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
6. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
7. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;

8. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/ jasa di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah;
10. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup tugasnya;
11. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
12. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
13. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi :

1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
4. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang difokuskan pada pelayanan urusan keuangan yang dapat meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Beberapa permasalahan dan hambatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana berdasarkan ketentuan ini maka Pemerintah Daerah secara bertahap harus melaksanakan penyesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyesuaian ini diwujudkan dengan penyusunan produk hukum daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang dimaksud serta pengambilan kebijakan-kebijakan khususnya dalam pengelolaan keuangan baik dari sisi pendapatan maupun belanja yang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.
- b. Amanat dari PP Nomor 12 Tahun 2019 agar daerah memenuhi kewajiban-kewajiban belanja wajib yang besarnya ditentukan peraturan perundangan yang berlaku. Ketidakpatuhan akan ketentuan ini berakibat pada penundaan transfer atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum. Oleh karena itu perlu kecermatan dalam penganggaran dan pengambilan kebijakan belanja daerah

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026, ditetapkan visi pembangunan Kota Magelang yaitu **“Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia”** Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kota Magelang, yaitu:

- MISI 1 Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq.
- MISI 2 Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat

- Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- MISI 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif.
- MISI 4 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.
- MISI 5 Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, sebagai garda depan Urusan, menyelenggarakan urusan Keuangan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-3 Kota Magelang yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan urusan/bidang , Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Belum terpenuhinya kualitas penganggaran sesuai dengan ketentuan;
- b. Belum efektifnya proses penatausahaan keuangan;
- c. Belum terpenuhinya tertib administrasi pencatatan keuangan yang diatur dalam kebijakan akuntansi untuk memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel;
- d. Kurang optimalnya penerimaan PAD;
- e. Penyajian usulan RKBMD dari OPD kurang tepat waktu;
- f. Pemanfaatan dan pengamanan BMD yang belum optimal;
- g. Kompetensi SDM Pengelola Barang yang masih kurang.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai;
- b. Komitmen semua pegawai untuk mencapai visi dan misi Kota Magelang
- c. Ketersediaan SDM yang lebih dapat dioptimalkan

- d. Adanya Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang bisa dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Magelang.

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah pada tahun 2024;
- b. Menetapkan kerangka pendanaan yang bisa menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada konsep money follow programme priority;
- c. Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Rancangan awal Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 0 (nol) program dan 0 (nol) kegiatan, Urusan Pilihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 3 program dan 7 kegiatan. Serta 1 program pendukung dan 6 kegiatan untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan

program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kota Magelang

Nama Perangkat Daerah: BPKAD Kota
 Magelang

lembar..... dari ...

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.048.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.048.900,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.604.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.604.700,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	3.132.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	3.132.900,00	

			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.901.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.901.500,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.951.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.951.600,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	30 Laporan	9.878.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	30 Laporan	9.878.800,00	

			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	10.126.987.544	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	11.046.586.210	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	10.501.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	10.501.200,00	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	18 Laporan	51.376.120	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan	51.375.640,00	

			Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.481.900	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.479.000,00	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	4.489.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	4.480.485,00	
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	67 Paket	17.097.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	67 Paket	17.060.300,00	
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	14 Paket	7.166.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Magelang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	7.165.800,00	

			Disediakan								
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Dokumen	4.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.200.000,00	
15	Penyediaan Bahan/Material	Kota Magelang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	21 Paket	4.896.300	Penyediaan Bahan/Material	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	21 Paket	4.892.600,00	
16	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	10.868.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Magelang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	13 Laporan	10.400.000,00	
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Laporan	62.536.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	90.102.000,00	
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	28 Unit	244.400.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	28 Unit	240.356.100,00	

			yang Disediakan					yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Mage lang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	52.813.460	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Mage lang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	60.125.060,00	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Mage lang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	319.676.992	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Mage lang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	320.676.992,00	
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Mage lang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	80.311.860	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Mage lang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	80.311.880,00	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kota Mage lang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	24 Unit	224.360.750	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kota Mage lang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	24 Unit	224.295.760,00	

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dibayarkan Pajaknya			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pajaknya			
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Mage lang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	126.747.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Mage lang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	97.824.200,00	
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Mage lang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	36.322.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Mage lang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	36.321.937,00	
24	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Mage lang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	122.700.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Mage lang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	192.025.000,00	
25	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Mage lang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	63.171.480	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Mage lang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	1 Unit	63.159.343,00	
26	Koordinasi dan Penyusunan	Kota Mage	Jumlah Dokumen KUA	2 Dokumen	64.290.400	Koordinasi dan Penyusunan	Kota Mage	Jumlah Dokumen KUA	2 Dokumen	315.590.400,00	

	KUA dan PPAS	lang	dan PPAS yang Disusun			KUA dan PPAS	lang	dan PPAS yang Disusun			
27	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Mage lang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	40.403.700	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Mage lang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	76.303.700,00	
28	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Mage lang	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	43.432.600	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Mage lang	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	43.432.600,00	
29	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Mage lang	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	23.574.300	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Mage lang	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	23.574.300,00	
30	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Mage lang	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	7.375.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Mage lang	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	7.372.700,00	
31	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Mage lang	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	7.414.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Mage lang	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	7.398.600,00	
32	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan	Kota Mage lang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan	2 Dokumen	224.089.100	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan	Kota Mage lang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan	2 Dokumen	331.789.100,00	

	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
33	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Magelang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	219.161.500	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Magelang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	255.061.500,00	
34	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	77.146.800	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	77.146.800,00	
35	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24 Dokumen	7.721.000			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24 Dokumen	7.721.000,00	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil	112 Dokumen	10.000.000,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian	112 Dokumen	5.979.000,00	

	dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			
36	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	10.140.100	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	10.140.100,00	
37	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	102 Dokumen	37.548.700	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	102 Dokumen	37.548.700,00	
38	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan	Kota Magelang	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan	22 Laporan	56.225.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan	Kota Magelang	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	22 Laporan	56.225.000,00	

	<p>dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</p>		<p>Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</p>			<p>dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</p>		<p>Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</p>			
--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

39	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	3 Dokumen	5.915.000			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	3 Dokumen	5.915.000,00	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan	12 Dokumen	93.093.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	93.093.000,00	

			atas SP2D dengan Instansi Terkait								
40	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Magelang	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	13.900.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Magelang	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	13.900.000,00	
41	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO dan Beban	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-	102 Dokumen	43.194.500	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO dan Beban	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	102 Dokumen	43.194.500,00	

			LO, dan Beban								
42	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	75.082.200	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	75.082.200,00	
43	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	57.541.900	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	57.541.900,00	

44	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	12.630.200	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	12.630.200,00	
46	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	204 Orang	66.904.100	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	204 Orang	66.904.100,00	
48	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	0,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	5.000.000.000,00	
49	Penyusunan Standar Harga	Kota Magelang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	110.461.300	Penyusunan Standar Harga	Kota Magelang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	110.461.300,00	
50	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Kota Magelang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	7 Dokumen	18.840.900	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Kota Magelang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	18.840.900,00	

	Daerah		Daerah			Daerah					
52	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	190.680.740	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	190.680.680,00	
53	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	366.910.400	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	424.590.000,00	
54	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	302.011.400	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	304.411.400,00	
55	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	152.918.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	152.917.700,00	
56	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan,	4 Dokumen	914.722.198	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	4 Dokumen	1.115.888.046,00	

	Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
57	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	14 Laporan	132.395.820	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	14 Laporan	132.395.820,00	
58	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	27.769.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	27.769.400,00	
59	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1.834.127.259	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1.552.177.803,00	
60	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak	Kota Magelang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan	4 Laporan	74.540.600	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak	Kota Magelang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	4 Laporan	74.540.200,00	

	Daerah		dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah			Daerah		Kebijakan Pajak Daerah			
61	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	17 Laporan	275.837.500	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	17 Laporan	275.837.500,00	
62	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Magelang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1200 Obyek Pajak	24.180.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Magelang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1200 Obyek Pajak	19.787.900,00	
63	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	36000 Dokumen	67.417.200	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	36000 Dokumen	104.388.700,00	
64	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	7.878.900	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	7.878.900,00	

65	Penagihan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	330.255.700	Penagihan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	227.055.600,00	
66	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	66.527.400	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	66.527.400,00	
67	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	19.840.800	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	97.258.900,00	
68	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	36.256.800	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	33.426.800,00	
69				TOTAL	17.750.978.423,00				TOTAL	24.152.237.256,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sebagai unsur penunjang pembangunan daerah melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2025 yang tertuang di dalam RPJMD 2021-2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2025 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut: (tidak ada)

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kota Magelang

Nama Perangkat Daerah : BPKAD Kota Magelang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **“Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”**. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap perangkat daerah. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

Dalam Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyalarsan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi

Jawa Tengah serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3. 1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

No.	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kota Magelang
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan
2	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan
3	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamm dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Dalam Mendukung visi dan misi Walikota Magelang, tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan Pemerintahan masuk pada misi ke-3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif. Sedangkan, Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berdasarkan Misi ke-3 Walikota dan Wakil Walikota Magelang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2
Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target pada tahun 2025
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	1. A = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. B = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah $(A+B)/2 \times 100\%$	92.03%

2		Meningkatkan ya pelayanan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Pelayanan Internal Perangkat Daerah yang berkualitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Bobot</th> <th>Sub-Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>20%</td> <td>A. Rencana Strategis (10%), analisis Rencana Misi (5%), Kualitas Rencana (5%) dan Implementasi Rencana (5%) B. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), analisis Perencanaan RKJ (5%), Kualitas RKJ (10%) dan Implementasi RKJ (5%)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20%</td> <td>A. Pemantauan pelaksanaan (5%) B. Kualitas Pengukuran (12,5%) C. Implementasi pengukuran (5,5%)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15%</td> <td>A. Pemantauan pelaporan (5%) B. Kualitas pelaporan (7,5%) C. Pemantauan pelaporan (5,5%)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10%</td> <td>A. Pemantauan evaluasi (5%) B. Kualitas evaluasi (5%) C. Pemantauan hasil evaluasi (5%)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Capaian Kinerja</td> <td>20%</td> <td>A. Kinerja yang dilaporkan (10,5%) B. Kinerja yang dilaporkan (10%) C. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Bobot	Sub-Kategori	1	Perencanaan Kinerja	20%	A. Rencana Strategis (10%), analisis Rencana Misi (5%), Kualitas Rencana (5%) dan Implementasi Rencana (5%) B. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), analisis Perencanaan RKJ (5%), Kualitas RKJ (10%) dan Implementasi RKJ (5%)	2	Pengukuran Kinerja	20%	A. Pemantauan pelaksanaan (5%) B. Kualitas Pengukuran (12,5%) C. Implementasi pengukuran (5,5%)	3	Pelaporan Kinerja	15%	A. Pemantauan pelaporan (5%) B. Kualitas pelaporan (7,5%) C. Pemantauan pelaporan (5,5%)	4	Evaluasi Kinerja	10%	A. Pemantauan evaluasi (5%) B. Kualitas evaluasi (5%) C. Pemantauan hasil evaluasi (5%)	5	Capaian Kinerja	20%	A. Kinerja yang dilaporkan (10,5%) B. Kinerja yang dilaporkan (10%) C. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)	Total		100%		100%
No	Kategori	Bobot	Sub-Kategori																														
1	Perencanaan Kinerja	20%	A. Rencana Strategis (10%), analisis Rencana Misi (5%), Kualitas Rencana (5%) dan Implementasi Rencana (5%) B. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), analisis Perencanaan RKJ (5%), Kualitas RKJ (10%) dan Implementasi RKJ (5%)																														
2	Pengukuran Kinerja	20%	A. Pemantauan pelaksanaan (5%) B. Kualitas Pengukuran (12,5%) C. Implementasi pengukuran (5,5%)																														
3	Pelaporan Kinerja	15%	A. Pemantauan pelaporan (5%) B. Kualitas pelaporan (7,5%) C. Pemantauan pelaporan (5,5%)																														
4	Evaluasi Kinerja	10%	A. Pemantauan evaluasi (5%) B. Kualitas evaluasi (5%) C. Pemantauan hasil evaluasi (5%)																														
5	Capaian Kinerja	20%	A. Kinerja yang dilaporkan (10,5%) B. Kinerja yang dilaporkan (10%) C. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)																														
Total		100%																															
3		Meningkatkan ya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>A. Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang tepat waktu</p> <p>B. Persentase pencairan belanja sesuai pengajuan</p> <p>C. Pelaporan Keuangan sesuai SAP</p> <p>DO = $(A+B+C)/3 \times 100\%$</p>	97.50%																												
4		Meningkatkan ya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	<p>A. rasio jumlah pemanfaatan BMD terhadap potensi pemanfaatan BMD</p> <p>B. Rasio pensertifikatan tanah</p> <p>C. Persentase pengumpulan usulan</p>	92.64%																												

				RKBMD secara benar dan tepat waktu D. Persentase pengumpulan Laporan BMD yang benar dan tepat waktu DO : $(A+B+C+D)/4 \times 100\%$	
5	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	A. Anggaran PAD B. Anggaran Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman $(A/B) \times 100\%$	35.64%
6		Meningkatnya pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	A. PAD tahun(t) B. Pendapatan Daerah tahun(t) $(A/B) \times 100\%$	25.81%

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam mengimplmetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2025 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Magelang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang pada tahun 2025 disusun sebanyak 4 program, yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program Pengelolaan Keuangan

Daerah, (3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan (4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program-program dalam Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Magelang
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah								
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	0 2				KEUANGAN								
5	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola							

						penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan							
5	0 2	0 1	2. 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD		100 %	28.518.400,0 0			100%	39.944.890,00
5	0 2	0 1	2. 0 1	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	7.048.900,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 dokumen	7.624.000,00
5	0 2	0 1	2. 0 1	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.604.700,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	4.261.218,00
5	0 2	0 1	2. 0 1	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.132.900,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	3.953.289,00
5	0 2	0 1	2. 0 1	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.901.500,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	4.694.169,00
5	0 2	0 1	2. 0 1	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.951.600,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	4.687.224,00
5	0 2	0 1	2. 0 1	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	- Kota Magelang, Semua Kecamatan	3 Laporan	9.878.800,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		3 laporan	14.724.990,00

					SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n, Semua Kel/Desa						
5	0 2	0 1	2. 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan		100 %	11.108.463.0 50,00			100%	10.820.809. 914,45
5	0 2	0 1	2. 0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38 Orang	11.046.586.2 10,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		38 orang	10.735.940. 952,45
5	0 2	0 1	2. 0 2	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	10.501.200,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		24 dokumen	18.136.511, 00
5	0 2	0 1	2. 0 2	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	51.375.640,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		18 laporan	66.732.451, 00
5	0 2	0 1	2. 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan		100 %	1.479.000,00			100%	1.630.000,0 0
5	0 2	0 1	2. 0 5	00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1.479.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			1.630.000,0 0

5	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah		100,00 %	138.301.185,00			100%	122.374.000,00
5	0	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Paket	4.480.485,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		35 paket	4.938.000,00
5	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67 Paket	17.060.300,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		80 paket	18.806.000,00
5	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Paket	7.165.800,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		15 paket	7.882.000,00
5	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	4.200.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		3 dokumen	4.620.000,00
5	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Paket	4.892.600,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		25 paket	5.385.000,00
5	0	0	2.	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	10.400.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		60 laporan	11.954.000,00
5	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	- Kota Magelang,	40 Laporan	90.102.000,00	PENDAPAT AN ASLI		50 laporan	68.789.000,00

			6		SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			DAERAH (PAD)			
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	240.356.100,00			100%	268.840.000,00
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Unit	240.356.100,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		15 unit	268.840.000,00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	461.113.932,00			100%	501.487.000,00
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	60.125.060,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		5000 laporan	61.500.000,00
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	320.676.992,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		5 laporan	351.644.000,00
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	80.311.880,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			88.343.000,00
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan		100 %	613.626.240,00			100%	630.630.000,00

						daerah								
5	0 2	0 1	2. 0 9	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Unit	224.295.760,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		25 unit	246.796.000,00	
5	0 2	0 1	2. 0 9	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	97.824.200,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		24 unit	139.422.000,00	
5	0 2	0 1	2. 0 9	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Unit	36.321.937,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		16 unit	39.954.000,00	
5	0 2	0 1	2. 0 9	00 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	192.025.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		3 unit	134.970.000,00	
5	0 2	0 1	2. 0 9	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	63.159.343,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12 unit	69.488.000,00	
5	0 2	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran		100 %	6.623.544.400,00			99.33%	6.576.065.920,00	
5	0 2	0 2	2. 0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase Penganggaran sesuai ketentuan		98.67 %	1.137.669.700,00			99.33%	782.308.240,00	
5	0 2	0 2	2. 0 1	00 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	- Kota Magelang, Semua Kecamatan	2 Dokumen	315.590.400,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 dokumen	70.719.440,00	

							n, Semua Kel/Desa							
5	0 2	0 2	2. 0 1	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	76.303.700,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 dokumen	44.444.070, 00	
5	0 2	0 2	2. 0 1	00 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Dokumen	43.432.600,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		28 dokumen	47.775.860, 00	
5	0 2	0 2	2. 0 1	00 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Dokumen	23.574.300,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		28 dokumen	25.931.730, 00	
5	0 2	0 2	2. 0 1	00 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Dokumen	7.372.700,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		28 dokumen	12.000.000, 00	
5	0 2	0 2	2. 0 1	00 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Dokumen	7.398.600,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		28 dokumen	9.000.000,0 0	
5	0 2	0 2	2. 0 1	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	331.789.100, 00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 dokumen	246.498.010 ,00	
5	0 2	0 2	2. 0 1	00 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	- Kota Magelang, Semua	2 Dokumen	255.061.500, 00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		3 dokumen	241.077.650 ,00	

					APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kecamatan, Semua Kel/Desa			(PAD)			
5	0 2	0 2	2. 0 1	00 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	77.146.800,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			84.861.480, 00
5	0 2	0 2	2. 0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan		100 %	230.521.800, 00			100%	249.757.680 ,00
5	0 2	0 2	2. 0 2	00 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	7.721.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			8.500.000,0 0
5	0 2	0 2	2. 0 2	00 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112 Dokumen	5.979.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		112 dokumen	11.000.000, 00
5	0 2	0 2	2. 0 2	00 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	10.140.100,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12 dokumen	11.154.110, 00
5	0 2	0 2	2. 0 2	00 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102 Dokumen	37.548.700,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		16 dokumen	41.303.570, 00
5	0	0	2.	00	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	- Kota	22	56.225.000,0	PENDAPAT		2	61.800.000,

	2	2	0 2	07	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan	0	AN ASLI DAERAH (PAD)		dokumen	00
5	0 2	0 2	2. 0 2	00 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	5.915.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			6.500.000,00
5	0 2	0 2	2. 0 2	00 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	93.093.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12 dokumen	95.000.000,00
5	0 2	0 2	2. 0 2	00 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua	1 Dokumen	13.900.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	14.500.000,00

					Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kel/Desa						
5	0 2	0 2	2. 0 3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase LK OPD yang sesuai dengan ketentuan		100 %	255.352.900,00			100%	44.000.000,00
5	0 2	0 2	2. 0 3	00 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102 Dokumen	43.194.500,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		102 dokumen	44.000.000,00
5	0 2	0 2	2. 0 3	00 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	75.082.200,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	0,00
5	0 2	0 2	2. 0 3	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	57.541.900,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 dokumen	0,00
5	0 2	0 2	2. 0 3	00 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.630.200,00	PAJAK DAERAH		1 dokumen	0,00
5	0 2	0 2	2. 0 11	00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	- Kota Magelang,	103 Orang	66.904.100,00	PENDAPAT AN ASLI		103 orang	0,00

			3		Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			DAERAH (PAD)			
5	0 2	0 2	2. 0 4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
5	0 2	0 2	2. 0 4	00 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	5.500.000,00
5	0 2	0 3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan pengelolaan barang milik daerah		89,29 %	2.477.955,24 6,00			89,29%	537.000.000,00
5	0 2	0 3	2. 0 1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD		80,71 %	2.477.955,24 6,00			81,51%	537.000.000,00
5	0 2	0 3	2. 0 1	00 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	110.461.300,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 dokumen	112.000.000,00
5	0 2	0 3	2. 0 1	00 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	18.840.900,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		7 dokumen	0,00
5	0 2	0 3	2. 0 1	00 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	190.680.680,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 laporan	0,00
5	0 2	0 3	2. 0 1	00 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	- Kota Magelang, Semua	2 Laporan	424.590.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		1 laporan	425.000.000,00

							Kecamatan, Semua Kel/Desa			(PAD)			
5	0 2	0 3	2. 0 1	00 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	304.411.400, 00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 laporan	0,00
5	0 2	0 3	2. 0 1	00 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	152.917.700, 00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		6 laporan	0,00
5	0 2	0 3	2. 0 1	00 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	1.115.888.04 6,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		7 dokumen	0,00
5	0 2	0 3	2. 0 1	00 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Laporan	132.395.820, 00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		14 laporan	0,00
5	0 2	0 3	2. 0 1	00 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	27.769.400,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		112 orang	0,00
5	0 2	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		165,48 %	2.458.879.70 3,00			124,37%	2.779.583.7 91,00
5	0 2	0 4	2. 0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah		100 %	2.458.879.70 3,00			100%	2.779.583.7 91,00
5	0	0	2.	00	Perencanaan Pengelolaan	Jumlah Dokumen	- Kota	1	1.552.177.80	PENDAPAT		1	1.925.833.6

	2	4	0 1	01	Pajak Daerah	Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	3,00	AN ASLI DAERAH (PAD)		dokumen	21,00
5	0 2	0 4	2. 0 1	00 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	74.540.200,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 laporan	83.255.130, 00
5	0 2	0 4	2. 0 1	00 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Laporan	275.837.500, 00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		17 laporan	126.131.250 ,00
5	0 2	0 4	2. 0 1	00 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1200 Obyek Pajak	19.787.900,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		800 objek pajak	25.389.000, 00
5	0 2	0 4	2. 0 1	00 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36000 Dokumen	104.388.700, 00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		36500	70.788.060, 00
5	0 2	0 4	2. 0 1	00 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	7.878.900,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12 dokumen	8.272.845,0 0
5	0 2	0 4	2. 0 1	00 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	227.055.600, 00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		10 dokumen	347.765.985 ,00

5	0	0	2.	00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	66.527.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 dokumen	69.853.770,00
5	0	0	2.	00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	97.258.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 laporan	84.224.490,00
5	0	0	2.	00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	33.426.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	38.069.640,00
									24.152.237.256,00				22.278.365.515,45

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2025. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2025. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2025 dan perkiraan Tahun 2026, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang pada tahun 2025 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025 (Tahun n)					
			Target Kinerja	Pagu Indika tif	Targe t Kiner ja	Pagu Indikati f	Target Kinerja	Pagu Indikati f	Targ et Kine rja	Pagu Indikatif	Targe t Kinerj a	Pagu Indikati f				
1	2	3	4		5		6		7		8					
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	0 2	0 1														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A															
5	0 2	0 1	2 0 1													
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
5	0 2	0 1	2 0 1	0 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.762.2 25	1 Dokum en	1.762.225	2 Dokumen	1.762.225	2 Doku men	1.762.225	6 Dokum en	7.048.900 ,00
5	0 2	0 1	2 0 1	0 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	651.175	0 Dokum en	651.175	0 Dokumen	651.175	0 Doku men	651.175	1 Dokum en	2.604.700 ,00
5	0 2	0 1	2 0	0 0	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen	783.225	0 Dokum	783.225	0 Dokumen	783.225	0 Doku	783.225	1 Dokum	3.132.900 ,00

			0 1 3	Dokumen Perubahan RKA- SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			en			men		en		
5	0 2	0 1	2 0 0 1 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen		0 Dokum en	725.375	0 Dokumen		0 Doku men		1 Dokum en	2.901.500 ,00
5	0 2	0 1	2 0 0 1 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen		0 Dokum en	737.900	0 Dokumen		0 Doku men		1 Dokum en	2.951.600 ,00
5	0 2	0 1	2 0 0 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan		7 Lapora n	2.469.7 00	8 Laporan		8 Lapora n		30 Laporan	9.878.800 ,00
5	0 2	0 1	2 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
5	0 2	0 1	2 0 0 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/b ulan		38 Orang/ bulan	2.714.9 10.638	38 Orang/bul an		38 Orang /bulan		38 Orang/ bulan	10.859.64 2.552,00
5	0	0	2	0	Pelaksanaan	Jumlah Dokumen	6	6	2.625.3	6	2.625.300	6	6	24	10.501.20

	2	1	.	0	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	00	Dokumen		Dokumen		Dokumen		0,00
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	12.843.910	4 Laporan	12.843.910	5 Laporan	12.843.910	5 Laporan	18 Laporan	51.375.640,00
5	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
5	0	0	2	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	369.750	3 Dokumen	369.750	3 Dokumen	369.750	3 Dokumen	12 Dokumen	1.479.000,00
5	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
5	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.120.121	3 Paket	1.120.121	3 Paket	1.120.121	3 Paket	11 Paket	4.480.485,00
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	4.265.075	17 Paket	4.265.075	17 Paket	4.265.075	17 Paket	67 Paket	17.060.300,00

5	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1.791.450	3 Paket	1.791.450	4 Paket	1.791.450	4 Paket	1.791.450	14 Paket	7.165.800,00
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.050.000	1 Dokumen	1.050.000	0 Dokumen	1.050.000	0 Dokumen	1.050.000	2 Dokumen	4.200.000,00
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	1.223.150	5 Paket	1.223.150	5 Paket	1.223.150	6 Paket	1.223.150	21 Paket	4.892.600,00
5	0	0	2	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	2.600.000	3 Laporan	2.600.000	3 Laporan	2.600.000	4 Laporan	2.600.000	13 Laporan	10.400.000,00
5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	22.525.500	10 Laporan	22.525.500	10 Laporan	22.525.500	10 Laporan	22.525.500	40 Laporan	90.102.000,00
5	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
5	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	60.089.025	7 Unit	60.089.025	7 Unit	60.089.025	7 Unit	60.089.025	28 Unit	240.356.100,00
5	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	15.031.265	3 Laporan	15.031.265	3 Laporan	15.031.265	3 Laporan	15.031.265	12 Laporan	60.125.060,00
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	80.169.248	3 Laporan	80.169.248	3 Laporan	80.169.248	3 Laporan	80.169.248	12 Laporan	320.676.992,00

			0	0	Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			n			n			
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	20.077.970	3 Laporan	20.077.970	3 Laporan	20.077.970	20.077.970	12 Laporan	80.311.880,00
5	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	56.073.940	6 Unit	56.073.940	6 Unit	56.073.940	56.073.940	24 Unit	613.626.240,00
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	24.456.050	5 Unit	24.456.050	5 Unit	24.456.050	24.456.050	20 Unit	224.295.760,00
5	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9.080.484	9 Unit	9.080.484	9 Unit	9.080.484	9.080.484	36 Unit	97.824.200,00
5	0	0	2	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	48.006.250	0 Unit	48.006.250	0 Unit	48.006.250	48.006.250	3 Unit	36.321.937,00
5	0	0	2	0	Pemeliharaan/Reh	Jumlah Gedung	0 Unit	15.789.	0 Unit	15.789.83	0 Unit	15.789.83	15.789.836	1 Unit	192.025.0

	2	1	.	0	abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		836		6		6			00,00
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										63.159.343,00
5	0	0	2		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	0 Dokumen	78.897.600	0 Dokumen	78.897.600	0 Dokumen	78.897.600	2 Dokumen	2 Dokumen	1.137.669.700,00
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	0 Dokumen	19.075.925	0 Dokumen	19.075.925	0 Dokumen	19.075.925	2 Dokumen	2 Dokumen	315.590.400,00
5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	10.858.150	0 Dokumen	10.858.150	0 Dokumen	10.858.150	0 Dokumen	28 Dokumen	76.303.700,00
5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	5.893.575	0 Dokumen	5.893.575	0 Dokumen	5.893.575	0 Dokumen	28 Dokumen	43.432.600,00
5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	1.843.175	0 Dokumen	1.843.175	0 Dokumen	1.843.175	0 Dokumen	28 Dokumen	23.574.300,00
5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	1.849.650	0 Dokumen	1.849.650	0 Dokumen	1.849.650	0 Dokumen	28 Dokumen	7.372.700,00

5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0 Dokumen	82.947.275	2 Dokumen	82.947.275	0 Dokumen	82.947.275	0 Dokumen	82.947.275	2 Dokumen	7.398.600,00
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	0 Dokumen	63.765.375	2 Dokumen	63.765.375	0 Dokumen	63.765.375	0 Dokumen	63.765.375	2 Dokumen	331.789.100,00
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	0 Dokumen	19.286.700	1 Dokumen	19.286.700	0 Dokumen	19.286.700	0 Dokumen	19.286.700	1 Dokumen	255.061.500,00
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah											77.146.800,00
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	1.930.250	6 Dokumen	1.930.250	6 Dokumen	1.930.250	6 Dokumen	1.930.250	24 Dokumen	7.721.000,00
5	0	0	2	0	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	28 Dokumen	1.494.750	28 Dokumen	1.494.750	28 Dokumen	1.494.750	28 Dokumen	1.494.750	112 Dokumen	5.979.000,00
5	0	0	2	0	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	3 Dokumen	2.535.025	3 Dokumen	2.535.025	3 Dokumen	2.535.025	3 Dokumen	2.535.025	12 Dokumen	10.140.100,00
5	0	0	2	0	Koordinasi,	Jumlah Dokumen	25	9.387.1	25Dok	9.387.175	26	9.387.175	26	9.387.175	102	37.548.70

	2	2	0	0	Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	75	umen		Dokumen		Doku men		Dokum en	0,00
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5 Laporan		5 Lapora n		6 Laporan		6 Lapora n		22 Laporan	56.225.00 0,00
								14.056.250		14.056.250		14.056.250		14.056.250		
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang	0 Dokumen	1.478.750	0 Dokum en		1.478.750		3 Doku men		3 Dokum en	5.915.000 ,00

			0 1 3	Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			n			n				
5	0 2	0 4	2 0 0 1 6	0 0 0 0 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	68.959. 375	4 Lapora n	68.959.37 5	4 Laporan	68.959.37 5	5 Lapora n	17 Laporan	275.837.5 00,00
5	0 2	0 4	2 0 0 1 7	0 0 0 0 7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	300 Obyek Pajak	4.946.9 75	300 Obyek Pajak	4.946.975	300 Obyek Pajak	300 Obyek Pajak	300 Obyek Pajak	1200 Obyek Pajak	19.787.90 0,00
5	0 2	0 4	2 0 0 1 8	0 0 0 0 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	9000 Dokumen	26.097. 175	9000 Dokum en	26.097.17 5	9000 Dokumen	26.097.17 5	9000 Doku men	36000 Dokum en	104.388.7 00,00
5	0 2	0 4	2 0 0 1 0	0 0 1 0 0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	3 Dokumen	1.969.7 25	3 Dokum en	1.969.725	3 Dokumen	1.969.725	3 Doku men	12 Dokum en	7.878.900 ,00
5	0 2	0 4	2 0 0 1 1	0 0 1 1 1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	56.763. 900	2 Dokum en	56.763.90 0	3 Dokumen	56.763.90 0	3 Doku men	10 Dokum en	227.055.6 00,00
5	0 2	0 4	2 0 0 1 3	0 0 1 3 0	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3 Dokumen	16.631. 850	3 Dokum en	16.631.85 0	3 Dokumen	16.631.85 0	3 Doku men	12 Dokum en	66.527.40 0,00
5	0 2	0 4	2 0 0 1 4	0 0 1 4 0	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan	1 Laporan	24.314. 725	1 Lapora n	24.314.72 5	1 Laporan	24.314.72 5	1 Lapora n	4 Laporan	97.258.90 0,00

					Retribusi Daerah	Retribusi Daerah										
5	0	0	2	0	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0 Laporan	8.356.7 00	0 Lapora n	8.356.700	0 Laporan	8.356.700	1 Lapora n	8.356.700	1 Laporan	33.426.80 0,00

BAB V PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2025.

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sebagai upaya mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kota Magelang maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2025 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Magelang.

Magelang, Juli 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG



NANANG KRISTİYONO, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19790517 199802 1 001



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG NOMOR 050.24/151/112
TAHUN 2024
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2025
WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuandalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. mempersiapkan dan mengumpulkan materi kebijakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024;
 - b. melaksanakan seluruh pengadministrasian pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024;
 - c. melaksanakan analisis dan menyusun dokumen penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024;
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka pejabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang pada
tanggal 21 Juni 2024

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
 NOMOR 050.24/151/112 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN
 PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN
 PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KOTA MAGELANG TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Ketua
3.	Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Wakil Ketua
4.	1 (satu) orang Analis Perencanaan Program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
6.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
7.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
9.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KOTA MAGELANG



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax : (0293) 364910
MAGELANG
56101

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : 188/ 23 /440/2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi
Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud huruf a
perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
: PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja
Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara
Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 (Nomor 1538));
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Magelang

Pada Tanggal : 7 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG



SUSILOWATI

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Magelang

Nomor : 188 /23/440/2022

Tanggal : 7 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di bawahnya;
- d. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- g. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;

- h. mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/ jasa di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik Daerah, dan urusan umum di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah;
- k. membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi :

- a. perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah;
- b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6					7	8
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah			I = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah II = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah DO = (I+II)/2 x 100%	89,76%	91,09 %	92,03 %	93,69 %	93,87 %	Laporan Bidang-bidang pada BPKAD	Kepala BPKAD
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (II)	A. Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang tepat waktu B. Persentase pencairan belanja sesuai pengajuan C. Presentase Pelaporan Keuangan sesuai SAP DO = (A+B+C)/3 x 100% A. Jumlah rancangan dokumen(RKUA, RPPAS; Raperda APBD, Raperwal APBD) tepat waktu dibandingkan dengan Jumlah rancangan dokumen penganggaran (RKUA, RPPAS; Raperda APBD, Raperwal APBD) x 100% B. Jumlah SP2D yang diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah SPM yang diterima x 100% C. Jumlah Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan SAP dibandingkan dengan jumlah Laporan Keuangan seluruh OPD x 100%	89,76%	91,43 %	91,43 %	93,10 %	93,10 %	Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi, Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Kepala BPKAD
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (II)	Persentase yang menunjukkan akuntabilitas pengelolaan BMD yang merupakan komposit dari nilai : A. Persentase BMD yang dimanfaatkan	89,77 %	90,76 %	92,64 %	94,29 %	94,64 %	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah dari Bidang Aset	Kepala BPKAD

				<p>B. Persentase OPD dengan BMD yang sesuai Standar</p> <p>C. Persentase Pengamanan BMD</p> <p>D. Persentase Penatausahaan BMD yang Berkualitas</p> <p>E. Persentase BMD yang Dipindahtanggankan</p> <p>DO = (A+B+C+D+E)/5 x 100%</p> <p>Merupakan komposit dari nilai indikator Persentase BMD yang dimanfaatkan, Persentase OPD dengan BMD sesuai standar, Persentase pengamanan BMD, Persentase penatausahaan BMD yang berkualitas, Persentase BMD yang dipindahtanggankan dibagi 5 (lima) dan dikalikan 100 (seratus) persen</p>							
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah			<p>Jumlah Anggaran PAD dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diterima dari transfer pusat (Dana Perimbangan) dan Transfer provinsi serta Pinjaman Daerah</p> <p>A. Anggaran PAD B. Anggaran Transfer Pusat C. Anggaran Transfer Provinsi D. Anggaran Pinjaman</p> <p>$DO = \frac{A}{(B + C + D)} \times 100\%$</p>	36,16%	34,61 %	35,64 %	36,69 %	36,69 %	Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pendapatan Daerah	Kepala BPKAD
		Meningkatnya Pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	<p>Merupakan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah Pendapatan Daerah</p> <p>A. Jumlah Pendapatan Asli Daerah B. Jumlah Pendapatan Daerah</p> <p>DO = (A/B) x 100%</p>	26,05%	25,25 %	25,81 %	26,37 %	26,37 %	Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pendapatan Daerah	Kepala BPKAD

				Merupakan komposit dari capaian indikator Persentase Peningkatan Potensi PAD (A) dan Persentase Peningkatan Realisasi PAD (B) dibagi 2 dikali 100%								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG



SUSILOWATI



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana perangkat daerah dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung rencana perangkat daerah diperlukan adanya dokumen rencana kerja yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 berpedoman pada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025.
- (4) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Daftar pagu indikatif Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
 NOMOR 15 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG
 TAHUN 2025

DAFTAR PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KOTA MAGELANG TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	127,273,947,629.00
2	Dinas Kesehatan Kota Magelang	354,837,155,337.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	76,409,935,179.00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	23,455,074,706.00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	12,468,649,271.00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang	4,842,786,611.00
7	Dinas Sosial Kota Magelang	13,527,624,400.00
8	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	10,528,484,461.00
9	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	31,756,552,717.00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	6,207,709,428.00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang	9,921,311,240.00
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang	16,756,697,611.00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang	16,313,193,050.00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	6,032,437,085.00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang	15,413,462,168.00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	7,065,394,411.00
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	9,253,223,143.00
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	19,270,990,015.00
19	Sekretariat Daerah Kota Magelang	40,570,167,100.00
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang	31,307,000,729.00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang	9,526,367,877.00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	24,152,237,256.00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang	28,415,527,906.00
24	Inspektorat Daerah Kota Magelang	14,436,756,946.00
25	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	23,748,471,369.00

26	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	27,715,477,060.00
27	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	22,850,091,112.00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	8,776,650,717.00
	TOTAL	992,833,376,534.00

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

